

PENGEMBANGAN USAHA BUMDES DESA TUNJUNG DAN DEPEHA

Ni Putu Sri Wati¹ dan I Made Madiarsa¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja

Jalan Bisma 22 Singaraja 81116 Bali

mademadiarsa@yahoo.co.id

Ringkasan Eksekutif

Program Ipteks bagi Masyarakat BUMDes Desa Tunjung dan Depaha bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam proses penyusunan laporan keuangan maupun penyusunan administrasi usaha secara umum. Program ini diinspirasi oleh kurangnya keterampilan pengurus BUMDes dalam melakukan administrasi usaha, proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pengurus dalam manajemen usaha khususnya usaha pertokoan dan simpan pinjam. Kondisi ini menyebabkan sumber daya manusia yang diperlukan lebih banyak, waktu kerja lebih lama, peluang kesalahan lebih besar, belum mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan BUMDes. Program IbM telah dilaksanakan tahun 2015 berlokasi di Desa Tunjung pada BUMDes Tunjung Mekar dan di Desa Depaha pada BUMDes Kertha Winangun Sari dengan metode PALS (*Participatory Action Learning System*). Hasil penerapan Ipteks adalah: (1) Pengelolaan administrasi usaha yang berbasis IT dengan hasil program akuntansi (*software*) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, (2) meningkatnya kemampuan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akuntansi, sehingga dengan *software* mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan cermat; 3) mitra mampu mengelola usaha dengan baik, memiliki perencanaan usaha yang jelas.

Kata kunci: BUMDes, laporan keuangan, manajemen usaha

Executive Summary

The program science and technology for communities BUMDes Tunjung Village and Depaha aims to improve the knowledge, skills in the process of preparing financial statements and the preparation of business administration in general. This program was inspired by a lack of skills in the board BUMDes conduct of business administration, the process of recording transactions and preparing financial statements is still done manually, lack of knowledge and skills of the managers in business management, especially shopping and savings and loan business. This condition causes the human resources needed more, longer working hours, greater chance of errors, have not been able to apply the principles of transparency and accountability in the management of BUMDes. IbM program was implemented in 2015 is located in the village of Alas on BUMDes Tunjung Mekar and Village Depaha on BUMDes Kertha Winangun Sari with PALS method (Participatory Action Learning System). The results of the application of science and technology are: (1) Management of business administration-based IT with the results of the accounting program (software) that is tailored to the needs of partners, (2) increasing the ability of partners on business administration appropriate accounting standards, so that the software is able to produce financial statements quickly and meticulously; 3) The partners are able to manage the business well, has a clear business plan.

Keywords: BUMDes, financial statements, business management

A. PENDAHULUAN

Terbentuknya suatu badan usaha yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa yang

disingkat BUMDes sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan terkait dengan aspek keuangan.

Betapa sulitnya masyarakat pedesaan dalam mengakses sumber modal dalam keadaan keterbatasan asset yang dimilikinya. BUMDes juga terbentuk dalam upaya untuk pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah ada di masyarakat pedesaan. Pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersebut pasal 11 ayat (1) disebutkan syarat pengelolaan BUMDes yaitu; a) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b) mendapat pembinaan manajemen; c) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; d) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; e) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut memerlukan proses yang sangat panjang. Memiliki pengurus yang berpengalaman dan professional memerlukan waktu dan keterlibatan dalam frekuensi yang cukup banyak. Pengelola menganut prinsip transparansi, akuntabel, rasional dan selanjutnya dapat dipercaya, bila dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas pengelolaan dengan jujur.

Terkait potensi pengembangan BUMDes Di Desa Depeha dan Tunjung sebagai lembaga keuangan mikro non bank karena, di dua desa tersebut hanya memiliki masing-masing satu lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk melayani jumlah penduduk untuk Desa Tunjung 3.378 jiwa, Desa Depeha sebanyak 4.815 jiwa. Mata pencaharian penduduk menurut lapangan usaha untuk di Desa Tunjung dan Depeha yaitu sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan

rakyat, perdagangan, industri, dan pengangkutan.

BUMDes yang ada di Desa Tunjung, dengan nama "BUMDes Tunjung Mekar" didirikan pada Bulan Desember 2012 dengan modal awal yang diperoleh dari program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) sebesar Rp.800.000.000,00. Jenis usaha yang dilakukan pada tahun pertama (tahun 2013) usaha simpan pinjam. Usaha ini belum dapat berkembang dengan baik karena para pengurus yang belum memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mengelola lembaga keuangan. Pada tahun kedua (tahun 2014) BUMDes Tunjung Mekar mulai merintis unit usaha baru yaitu Usaha PAM Desa, Usaha Pertokoan dan menerima Deposito dengan administrasi masih sistem manual.

Untuk BUMDes di Desa Depeha dengan nama "BUMDes Kertha Winangun Sari" dibentuk pada bulan Desember 2012 dengan sumber modal awal dari Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) sebesar Rp.800.000.000,00 Jenis usaha yang dilakukan yaitu usaha pokok dalam bidang simpan pinjam, pertokoan. Dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik dalam usaha simpan pinjam maupun pertokoan belum menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Pengelola BUMDes dalam memberikan pelayanan masih melakukan pencatatan secara manual, dan juga belum memahami untuk menyusun sebuah laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Seperti di BUMDes Tunjung Mekar dan BUMDes Kertha Winangun Sari, dalam unit simpan pinjam, pencatatan terhadap transaksi kredit dilakukan secara manual dan terpisah dalam lembaran kertas, setiap hari pengurus melakukan rekapitulasi sehingga waktu kerja yang diperlukan untuk

mengerjakan administrasi keuangan semakin lama. Pada saat nasabah ingin mengetahui sisa pinjamannya, pengurus tidak serta merta dapat memberikan informasi, karena harus dicari berkasnya yang ada di antara tumpukan berkas di dalam lemari. Dengan kondisi seperti tersebut jumlah nasabah yang dapat dilayani semakin sedikit, waktu kerja yang dibutuhkan semakin lama, yang menyebabkan pengurus bekerja melebihi jam kerja, juga akan dapat menyebabkan terkikisnya kepercayaan anggota masyarakat terhadap BUMDes. Dalam unit usaha pertokoan juga ditemukan bahwa administrasi keuangan yang disusun belum sesuai dengan standar akuntansi. Proses pencatatan transaksi secara manual. Perhitungan jasa pelayan toko dibayar berdasarkan laba kotor penjualan setiap hari. Setiap hari pelayan toko harus membuat catatan barang yang laku yang dilengkapi dengan harga pokok, harga jual, dan labanya. Hal ini juga menyebabkan pekerjaan pelayanan toko tidak saja memberikan pelayanan tetapi juga mencatat semua jenis barang secara manual. Masalah muncul saat pelanggan datang bersamaan dalam jumlah banyak dan memerlukan pelayanan secepatnya, sehingga sering proses pencatatan tidak tuntas. Kalau hal seperti ini terus terjadi dapat diduga prinsip transparansi dan akuntabel masih jauh dari harapan.

Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus dalam bidang administrasi usaha dapat pada menurunnya pelayanan yang dapat diberikan pada masyarakat hal ini akan berdampak pada menurunnya keuntungan yang diperoleh dan juga akan terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat, karena belum mampu menunjukkan transparansi dan akuntabel. Untuk mencegahnya perlu proses pemberdayaan terhadap pengurus BUMDes khususnya terkait pemahaman dan keterampilan akuntansi usaha, dan perlunya program konsolidasi. Selain itu akan sangat

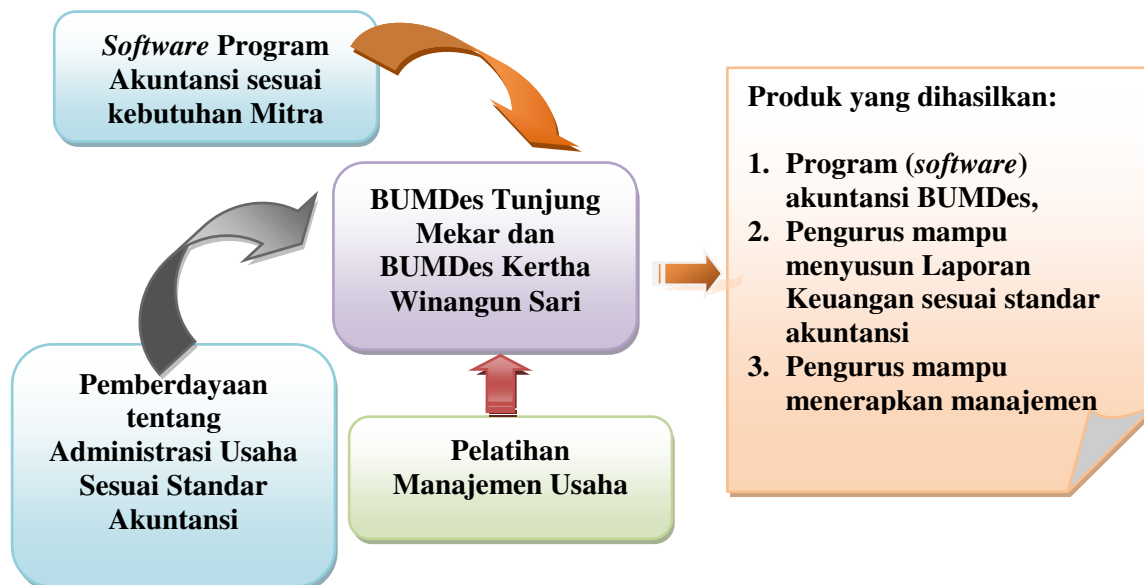
membantu bila disediakan *software* yang memadai untuk merekam semua transaksi ekonomi di setiap unit usaha.

B. SUMBER INSPIRASI

Keberhasilan sebuah BUMDes sangat dipengaruhi oleh partisipasi anggota masyarakat. Partisipasi dan loyalitas anggota masyarakat secara signifikan ditentukan oleh tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Kepercayaan masyarakat dapat dijaga bila BUMDes mampu mengelola administrasi dengan menganut prinsip transparansi, akuntabel. Selama ini BUMDes yang ada di Desa Tunjung dan Depeha belum mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan cermat, beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah (1) kurangnya keterampilan pengurus BUMDes dalam melakukan administrasi usaha sesuai standar akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan, (2) proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan sumber daya manusia lebih banyak, waktu kerja lebih lama, peluang kesalahan lebih besar, (3) kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dari para pengurus dalam manajemen usaha khususnya usaha pertokoan dan simpan pinjam

C. METODE

Pemberdayaan pengurus atau meningkatkan kemampuan mitra dalam mengelola usaha dan organisasinya dilakukan dengan metode PALS (*Participatory Action Learning System*). Prinsip dasar dari metode PALS adalah pelibatan mitra dalam proses pembelajaran aktif partisipasi dalam program aksi penerapan ipteks pengelolaan administrasi usaha, penyempurnaan sistem akuntansi sehingga membentuk suatu sistem interaksi pembelajaran masyarakat secara partisipatif, baik secara personal maupun komunal. Secara diagramatik, rencana pemecahan permasalahan mitra dijabarkan seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Metode Pemecahan Permasalahan Mitra

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, maka dilakukan: (1) Evaluasi terhadap waktu dan tenaga yang diperlukan untuk membuat administrasi usaha, (2) setelah install program akuntansi, dilakukan pengamatan terhadap waktu yang diperlukan untuk mengerjakan administrasi pembukuan, (3) melakukan pengamatan terhadap hasil laporan keuangan dan kemampuan karyawan untuk memberikan informasi (menampilkan).

D. KARYA UTAMA

Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan karya-karya yang direncanakan, mulai dari sosialisasi program, pertemuan koordinasi dengan Pengelola BUMDes, Kepala Desa Tunjung dan Depeha, instal program dan implementasi, pendampingan dan pelatihan penggunaan program akuntansi, pendampingan dan pelatihan manajemen usaha. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi program IbM dilakukan bertempat di Desa Depaha dan Tunjung pada tanggal 27 Maret 2015.



Gambar 2. Sosialisasi Dengan Pelaksana Operasional BUMDes Kertha Winangun Sari Desa Depaha (kiri) dan BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung (kanan)

Pelaksanaan program IbM ini mengikutsertakan dua orang mahasiswa dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unipas sebagai tenaga lapang. Tim pelaksana



Gambar 6. Pengelolaan BUMDes oleh BPMPD dan Tim pelaksana program (Kiri) dan pelatihan serta pendampingan penggunaan *software*

E. ULASAN KARYA

Berdasarkan keberhasilan program IbM yang telah dicapai dapat dikaji secara lebih mendalam bahwa keberhasilan untuk menciptakan program akuntansi khusus untuk BUMDes dan keterampilan pengelola dalam menggunakannya masih dipandang perlu ditingkatkan melalui program pendampingan, karena dalam menjalankan program sering mengalami kendala atas jenis transaksi yang baru atau kesalahan dalam menginput data. BUMDes (mitra) sudah mampu menghasilkan laporan keuangan setiap hari dengan lebih akurat, mampu memberikan informasi seperti tentang kewajiban nasabah, cek tabungan setiap saat. Karyawan yang diperlukan untuk mengerjakan administrasi keuangan hanya satu orang, yang sebelum ada program dikerjakan oleh 3 orang. Pelayanan kepada seorang nasabah diperlukan waktu lebih singkat, biasanya untuk nasabah peminjam baru membutuhkan kelengkapan administrasi lebih banyak dan waktu lebih lama, dengan

adanya program, sudah disiapkan form isian yang dengan mengisi identitas sekali saja untuk beberapa dokumen. Jumlah nasabah yang dapat dilayani akan semakin banyak. Pengelola BUMDes sangat penting menyusun perencanaan usaha, sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja, sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan. Kemampuan BUMDes untuk menghasilkan laporan keuangan dengan lebih baik menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel, dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat meningkat dapat diukur dari meningkatnya tabungan baik dari segi nominal maupun orangnya di BUMDes. Tingkat produktivitas karyawan dan BUMDes dapat ditingkatkan.

F. KESIMPULAN

Kesimpulan pelaksanaan program IbM BUMDes Desa Tunjung dan Depeha tahun 2015 telah berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat, antara lain: (1) Pengelolaan administrasi usaha yang berbasis IT (*information technology*) dengan hasil program akuntansi (*software*) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, mampu menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dengan mudah, (2) meningkatnya kemampuan dan keterampilan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akuntansi, sehingga pengelola mampu bekerja secara efektif dan efisien, produktivitas kerja karyawan meningkat dan juga kinerja BUMDes akan meningkat, 3) mitra mampu mengelola usaha dengan baik, memiliki perencanaan usaha yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan pengelola lebih terarah dan terukur.

G. DAMPAK DAN MANFAAT

Beberapa dampak dan manfaat dari pelaksanaan program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah: (1) adanya laporan

keuangan yang dihasilkan dengan cepat dan cermat setelah ada program akuntansi, memberikan dampak pada tumbuh dan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes karena mampu dikelola dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, (2) adanya kemampuan dan keterampilan pengelola tentang administrasi usaha memberikan dampak pada meningkatnya efisiensi waktu dan tenaga, BUMDes memiliki arsip atau dokumen laporan keuangan secara baik dan rapi. (3) adanya rencana usaha yang secara rutin disusun memberikan dampak pada terarah dan terukur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes, juga memungkinkan untuk terinspirasi mencoba untuk merencanakan jenis usaha lain yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. (2001). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Basyaib Fachmi. (2007). *Keuangan Perusahaan, Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel*, Kencana Jakarta
- Harahap Sofyan Safri (1998). *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Robert Libby dkk. (2008). *Akuntansi Keuangan*, Edisi ke lima, Andi Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

I. PERSANTUNAN

Atas suksesnya pelaksanaan Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) di Desa Depaha dan Tunjung, maka melalui tulisan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: (1) DP2M DIKTI atas dana Program IbM tahun 2015 yang telah diberikan, (2) Rektor Universitas Panji Sakti, dan Ketua LP2M Universitas Panji Sakti, (3) Dekan Fakultas Ekonomi Unipas, (4) Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng, (5) Perbekel Depaha beserta jajarannya, Perbekel Tunjung beserta jajarannya, Pengelola BUMDes Tunjung Mekar beserta karyawan, BUMDes Kertha Winangun Sari beserta karyawannya, atas dukungan dan kerjasamanya.